



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LAKIP)**

**KECAMATAN BIATAN  
KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Sub bagian penyusunan program keuangan dan aset Kecamatan Biatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Biatan Tahun 2023 telah dapat disusun sesuai dengan rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP, setelah pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Biatan serta dapat diketahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Biatan.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dan konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Biatan.

Demikian, semoga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Biatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Biatan, 01 Maret 2024  
Camat,  
  
**AIDIL FITRI, S.ST.MP**  
Pembina  
NIP 19701128 199212 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), selain itu informasi dalam dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.

Kecamatan Biatan dipimpin oleh Camat, terdiri 1(satu) Sekretaris Kecamatan, 2(dua) Kepala Sub Bagian, dan 5(lima) Kepala Seksi, jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 23(dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 14(empat belas) orang PNS dan 9(sembilan) orang Non PNS. Kecamatan Biatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Visi Kecamatan Biatan mengacu kepada Visi RPJMD Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Biatan 2021-2026 adalah "MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN". Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2023 Kecamatan Biatan melaksanakan 5(lima) program dan 10(sepuluh) kegiatan dan 23(dua puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang ada di DPA/DPPA sebesar Rp. 4.435.082.968,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.357.444.968,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.281.553.152,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.075.891.816,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) serta Belanja Modal sebesar Rp. 77.638.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 77.638.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan

ribu rupiah), dari seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 untuk mencapai sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan dari sasaran program dan kegiatan yang dicapai sebesar Rp. 4.022.603.247,00 (empat milyar dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 90,70%, dari target yang ditetapkan sebesar 94,52% atau Rp. 4.192.040.421,00 (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) kategori sangat baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Biatan maka telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan target dan realisasi kinerja semua Subbag. dan Kasi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Biatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reviu terhadap program atau kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan.

Biatan, 01 Maret 2024  
Camat,  
  
**AIDIL FITRI, S.ST.MP**  
Pembina  
NIP 19701128 199212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	4
1.4. Sumber Daya Manusia .....	10
1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Stragis .....	14
2.1.1. Visi dan Misi.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	16
2.1.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	19
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	20
2.4. Perjanjian Kinerja (PK).....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	28
3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	29
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kineja .....	30
3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	31
3.3.2. Membandingkan antara realisasi dan kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	31
3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	34
3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	37
3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	38
3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun gagalannya pencapaian pernyataan kinerja .....	38
3.4. Realisasi Anggaran .....	39
BAB IV PENUTUP .....	44
Daftar Lampiran.....	46
5.1. Perjanjian Kinerja .....	

5.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	
5.3. Pengukuran Kinerja Tahunan.....	
5.4. Matrik Rencana Strategis.....	
5.5. Indikator Kinerja Utama .....	
5.6. Cascading .....	
5.7. Rencana Aksi .....	
5.8. Rangkaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran .....	
5.9. Lain-lain yang dianggap perlu.....	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun Anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Matrik Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Biatan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Biatan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Biatan;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Biatan pada tahun berikutnya;
- Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Biatan antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PenyusunanPenetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Berau;
- Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

#### 1.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Biatan adalah sebuah Kecamatan termuda dari 13 Kecamatan lainnya diwilayah Kabupaten Berau, merupakan pemekaran eks wilayah Kecamatan Talisayan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 15 Pebruari 2005. Adapun batas administrasi Kecamatan Biatan sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tabalar dan Laut Sulawesi
- Timur : Kecamatan Talisayan
- Selatan : Kabupaten Kutai Timur
- Barat : Kecamatan Tabalar dan Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Biatan mempunyai ibu kota Kampung Biatan Lempake yang berjarak  $\pm$  130 km dari ibu kota Kabupaten Berau yaitu Kecamatan Tanjung Redeb. Adapun secara administrasi Kecamatan Biatan terbagi dalam 8 (delapan) kampung yang terdiri dari :

- Biatan Lempake
- Biatan Ulu
- Biatan Bapinang
- Biatan Baru
- Biatan Ilir
- Karangan
- Manunggal Jaya
- Bukit Makmur Jaya

#### 1.1.2. Kondisi Demografis

Kecamatan Biatan memiliki jumlah penduduk 7.092 jiwa yang terbagi dalam laki-laki 3.773 jiwa dan perempuan 3.319 jiwa, sedangkan untuk persebaran/kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Kampung	Jumlah Jiwa		Jumlah(L+P)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Biatan Lempake	1085	926	2011
2.	Biatan Ulu	119	95	214
3.	Biatan Bapinang	378	318	696
4.	Biatan Baru	319	310	629
5.	Biatan Ilir	516	416	932

No	Nama Kampung	Jumlah Jiwa		Jumlah(L+P)
		Laki-Laki	Perempuan	
6.	Karangan	297	257	554
7.	Manunggal Jaya	635	620	1255
8.	Bukit Makmur Jaya	424	377	801
	Jumlah	3773	3319	7092

Sumber Data : Laporan Bulanan Kampung di Kecamatan Biatan

### 1.1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Biatan

Kecamatan Biatan merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau, adapun pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu tugas atributif dan tugas delegatif.

### 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Biatan (sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Biatan Kabupaten Berau), adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan kelurahan, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan kelurahan;

- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

### 1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

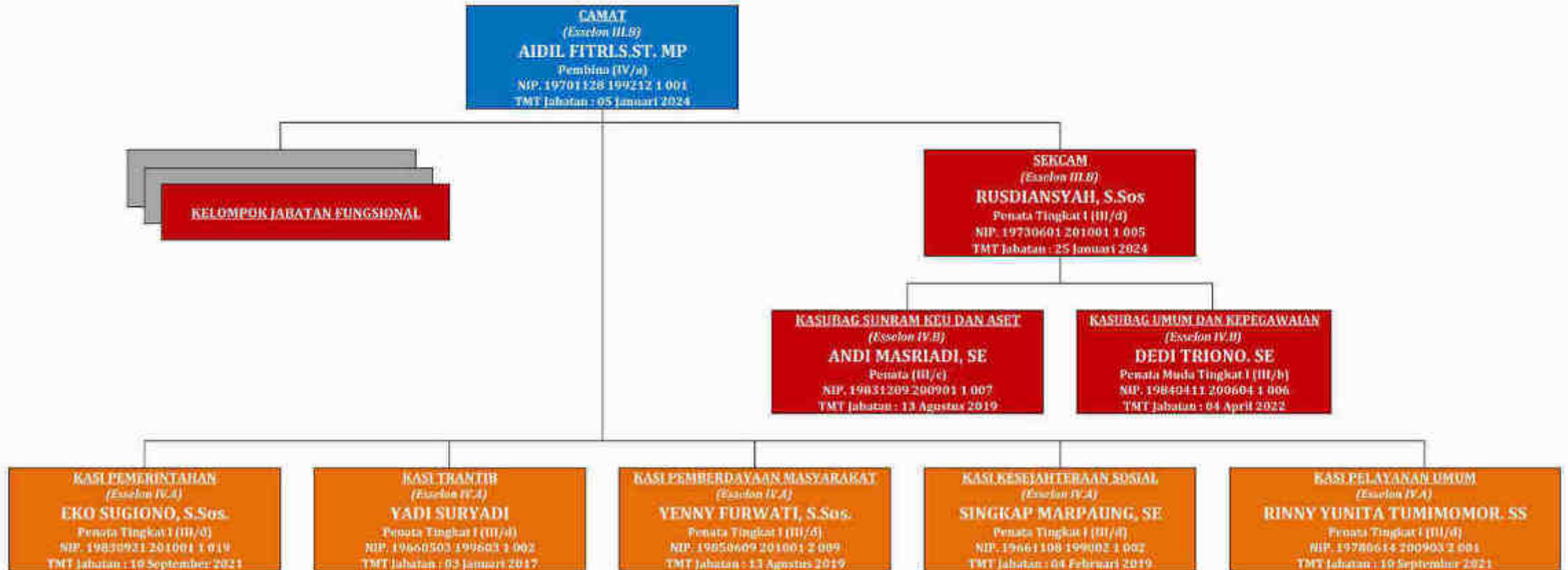
Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kecamatan Biatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau terdiri dari :

- Camat;
- Sekretaris dibantu para :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan aset;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016. Adapun susunan organisasi Kecamatan Biatan sebagai mana tergambar seperti di bawah ini :

Gambar 1.3.1

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BIATAN KABUPATEN BERAU



Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

Tabel 1.3.2  
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) KECAMATAN BIATAN  
PER JANUARI 2024

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA
					GOL	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN	THN LULUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	AIDIL FITRI, S.ST.,MP	Samarinda	28/11/70	197011281992121001	IV/a	01/04/18	III/b	CAMAT	05/01/24	22	03	PIM IV	2014	S.2 Pengembangan Masyarakat	2008	L	ISLAM
2	RUSDANSYAH, S.Sos.	Talisayan	01/06/73	197306012010011005	III/d	01/04/22	III/b	SEKRETARIS	25/01/24	19	02	PIM IV	2017	S.1 Ilmu Sosial Politik	1998	L	ISLAM
3	SINGKAP MARPAUNG, SE	Asahan	08/11/66	196611081990021002	III/d	01/04/18	IV/a	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	04/02/19	23	02	-	-	S.1 Ekonomi	2011	L	ISLAM
4	YADI SURYADI	Cianjur	03/04/66	196603031996031002	III/d	01/04/20	IV/a	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	30/12/16	19	07	PIM IV	2013	SMA	1985	L	ISLAM
5	EKO SUGIONO, S.Sos.	Beran	21/09/83	198309212010011019	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	10/09/21	13	03	PKP	2021	S.1 Ilmu Sosial	2009	L	ISLAM

Bersambung ...

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA
					GOI	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN	THN LULUS		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	YENNY FURWATI, S.Sos.	Samarinda	09/06/85	198506092010012009	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13/08/19	12	03	PIM IV	2018	S.1 Ilmu Sosial	2009	P	ISLAM
7	RINY YUNITA TUMMOMOR, S.S	Tondano	14/06/78	197806142009032001	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	10/09/21	13	01	PIM IV	2018	S.1 Bahasa Inggris	2003	P	KRISTEN
8	ANDI MASRIADI, SE	Karangas	09/12/83	198312092009011007	III/c	01/10/22	IV/b	KASUBBAG SUNRAM, KEUANGAN DAN ASET	13/08/19	13	09	PKP	2022	S.1 Ekonomi Manajemen	2005	L	ISLAM
9	DEDI TRIONO, SE	Berau	11/04/84	198404112006041006	III/b	01/04/23	IV/b	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	04/04/22	14	04	PKP	2023	S.1 Ekonomi Manajemen	2012	L	ISLAM
10	DARYANA	Garut	12/05/76	197605122000081001	III/a	01/10/21	-	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	-	13	02	-	-	SMA	2002	L	ISLAM

Bersambung ...

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA
					GOI	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN	THN LULUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
11	SALMON TONAPA	Tana Toraja	25/05/78	197805252005021004	III/a	01/10/21	-	PENGADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK	-	11	08	-	-	SMK	1996	L	KRISTEN
12	BAMBANG NUGROHO	Purworejo	03/12/75	197512032007011016	II/d	01/10/21	-	BENDAHARA PENGELUARAN	-	17	01	-	-	STM	1995	L	ISLAM
15	ASRI	Bintan Ulu	10/07/85	198507102007011003	II/d	01/10/21	-	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	-	14	09	-	-	SMA	2005	L	ISLAM
14	SABARUDDIN	Karangun	01/07/70	197007012000061002	II/c	01/04/21	-	STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	-	17	10	-	-	SMA	2005	L	ISLAM

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

Tabel 1.3.3  
DAFTAR TENAGA KONTRAK KECAMATAN BIATAN  
PER JANUARI 2024

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NOMOR DAN TANGGAL SK		MASA KERJA		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA	JABATAN
				AWAL	AKHIR	THN	BLN	NAMA JURUSAN	TAHUN LULUS			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	STEPHANUS SUGIARTO	Tering	09/01/1969	814/004/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/001/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	18	00	SMA PAKET C	2008	L	ISLAM	Penjaga Malam
2	HARIS SUHENDI	Talisayan	26/07/1974	814/3405/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/002/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	18	00	SMA IPS	1993	L	ISLAM	Tenaga Administrasi
3	ABD. RAZAK	Talisayan	06/03/1978	814/3404/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/003/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	18	00	SMU IPS	1998	L	ISLAM	Tenaga Administrasi
4	PURDA	Pantai Harapan	13/09/1985	814/3426/BKD-I/2006 02/05/2006	814.1/004/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	17	10	SMK PENJUALAN	2004	P	ISLAM	Tenaga Administrasi
5	BADARIAH	Biatan Lempake	13/06/1984	814/1892/BKD-I/2007 01/10/2007	814.1/005/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	16	02	SMA PAKET C	2007	P	ISLAM	Tenaga Administrasi
6	M. SALEH	Bontang	12/06/1986	11 Tahun 2010 01/02/2010	814.1/006/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	13	10	SMA IPS	2006	L	ISLAM	Tenaga Administrasi
7	YUSRIADI	Karangan	16/10/1982	16 Tahun 2011 01/05/2011	814.1/007/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	12	07	SMK OTOMOTIF	2003	L	ISLAM	Sopir Operasional
8	TANTI YOSEVANINGSIH	Berau	26/04/2001	814.1/3889/BKPP-I/2019 01/07/2019	814.1/008/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	4	05	SMA IPS	2019	P	ISLAM	Tenaga Kebersihan
9	HENDRI IRAWAN	Wajageseng	05/02/1999	814.1/26/Set. C-BTN/2022 01/03/2022	814.1/009/Set. C-BTN/2024 02/01/2024	1	9	SMK Teknik Komputer dan Informatika	2018	L	ISLAM	Tenaga Kebersihan

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

## 1.4 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah ASN atau personil pegawai Kantor Camat Biatan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) saat ini berjumlah 23(Dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS Kantor Camat sebanyak 14(empat belas) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9(semblan) orang dengan komposisi, pangkat, jabatan dan golongan serta latar belakang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4.1  
Komposisi Pegawai

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	0	1
2	Sekretariat :			
	2.1 Sekretaris Camat	1	0	1
	2.1.1 Kasubag Sunram, Keu & Aset	1	0	1
	2.1.1.1 Staf Pendukung	3	0	3
	2.1.2 Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1	0	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung	6	1	7
3	Seksi-Seksi			
	3.1 Kepala Seksi Pemerintahan	1	0	1
	3.1.1 Staf Pendukung	1	1	2
	3.2. Kepala Seksi Tramtib	1	0	1
	3.2.1 Staf POLPP	0	0	0
	3.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyar	0	1	1
	3.3.1 Staf Pendukung	0	1	1
	3.4 Kepala Kesejahteraan Sosial	1	0	1
	3.4.1 Staf Pendukung	0	0	0
	3.5 Kepala Seksi Pelayanan Umum	0	1	1
	3.5.1 Staf Pendukung	1	0	1
	<b>Jumlah</b>			<b>23</b>

Tabel 1.4.2

Jumlah Pegawai Menurut Status, Jabatan, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Jabatan					Jumlah
			Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
1	PNS							
	Pembina Tk I	IV/b	0	0	0	0	0	0
	Pembina	IV/a	1	0	0	0	0	1
	Penata Tk.I	III/d	0	1	5	0	0	6
	Penata	III/c	0	0	0	1	0	1
	Penata Muda Tk. I	III/b	0	0	0	1	0	1
	Penata Muda	III/a	0	0	0	0	2	2
	Pengatur Tk.I	II/d	0	0	0	0	2	2
	Pengatur	II/c	0	0	0	0	1	1
	Peng. Md Tk I	II/b	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Mda	II/a	0	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	9	9
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

Tabel 1.4.2

Kepegawaian menurut latar belakang Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
1	PNS						
	Strata 3	0	0	0	0	0	0
	Strata 2	0	1	0	0	0	1

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
	Strata 1	0	1	4	2	0	7
	Diploma 4	0	0	0	0	0	0
	Diploma 3	0	0	0	0	0	0
	Diploma 2	0	0	0	0	0	0
	SLTA	0	0	1	0	5	6
	SLTP	0	0	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kontak						
	Strata 1	0	0	0	0	0	0
	Diploma 4	0	0	0	0	0	0
	Diploma 3	0	0	0	0	0	0
	Diploma 2	0	0	0	0	0	0
	SLTA	0	0	0	0	9	9
	SLTP	0	0	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0	0	0

#### 1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Kecamatan Biatan merupakan lembaga perwakilan pemerintah Kabupaten di tingkatan Kecamatan, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten sehingga pembangunan wilayah dapat secara menyeluruh. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Biatan yaitu menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Biatan memiliki 23(Dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS Kantor Camat sebanyak 14(empat belas) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9(sembilan) orang honorer/tenaga kontrak. Komposisi pegawai tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan namun kualitas SDM/tiingkat pendidikan yang terbatas dan belum maksimal dibandingkan dengan beban kerja ada, sehingga membutuhkan keikutsertaan pada pelatihan/diklat maupun pembinaan-pembinaan tentang administrasi kepegawaian agar tepat sasaran sesuai yang diharapkan. demikian juga dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Permasalahan Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Biatan adalah :

- o Terjadinya sengketa kepemilikan tanah dimasyarakat.

- Belum adanya dasar hukum berupa pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Pagu Anggaran yang terbatas pada program dan kegiatan di luar kegiatan rutin kantor.
- Kualitas SDM/tiingkat pendidikan yang terbatas dibandingkan dengan beban kerja
- Kurangnya kegiatan diklat/pelatihan maupun pembinaan-pembinaan untuk PNS/honorier/Tenaga Kontrak.
- Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kurangnya koordinasi antar seksi-seksi dan semua pihak yang terkait.

Berbagai isu tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis

Bupati dan Wakil Bupati Berau, periode 2021-2026, menetapkan visi dan misi kabupaten berau yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

## 2.1.1. Visi dan Misi

Berikut Visi dan misi Kecamatan Biatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Biatan Kabupaten Berau 2021-2026 sebagai berikut :

Visi :

“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumber daya alam yaitu sektor pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backwardandforwardlinkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh tiga kata kunci di dalam visi ini, yaitu :

- o Sejahtera

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan

diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

- o Unggul

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sector tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

- o Berdaya Saing

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Berau.

Misi :

- o untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut:

- Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
- Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
- Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Mewujudkan visi dan misi tentu harus terukur, agar pencapaian setiap tahapan dapat dimonitor, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Penentuan tujuan dan sasaran menjadi faktor penting untuk kepentingan dimaksud. Secara detail tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Biatan Tahun 2023 - 2026 disajikan pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Biatan adalah berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2023-2026, maka untuk Kecamatan Biatan dirumuskan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

- Visi RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.
- Misi IV RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Berau, maka Kecamatan Biatan merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1  
Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
○ Meningkatkan Pelayanan Publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat	○ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan	○ Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kampung se Kecamatan  ○ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

### 2.1.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka menentukan strategi dan kebijakan menjadi makin penting oleh karena sebagai acuan didalam menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan mempunyai hubungan korelatif yang akan sangat terkait dan mengikat, sehingga seolah-olah sebuah paket yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melaksanakan satu dengan meninggalkan yang lain. Hal tersebut penting dipahami agar dalam melaksanakan kegiatan tidak hanya sekedar output tercapai, tetapi sampai tercapainya sasaran dan tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh periode 2021 - 2026 adalah :

- Strategi
  - Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
  - Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung.
  - Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
- Kebijakan
  - Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kampung.
  - Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
  - Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

- Program

Program Kecamatan Biatan Tahun 2023 - 2026 dalam rangka pencapaian visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada table bawah ini :

Tabel 1.13  
Program Kecamatan Biatan Tahun 2023 - 2026  
dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau

<b>VISI (RPJMD)</b>	: Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan sumber Daya Manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan		
<b>MISI 4 (RPJMD)</b>	: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se kecamatan Biatan	Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kampung
		Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan kampung	Pelayanan prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman
		Memfasilitasi kegiatan lembaga pendidikan, olahraga, keagamaan dan perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Biatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.1  
Tujuan, Sasaran dan IKU

TUJUAN	SASARAN	IKU
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan</li> <li>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di tingkat Kecamatan</li> <li>Nilai LAKIP Perangkat Daerah</li> </ul>

Tabel 2.2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT.	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2023	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan</li> <li>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai survey IKM pelayanan publik di tingkat Kecamatan</li> </ul>	Nilai	93,45	94,00	94,52	96,00	97,00	97,35
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai LAKIP Perangkat Daerah</li> </ul>	Nilai	93,45	95,00	94,52	96,00	97,00	97,35

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Biatan Tahun 2023-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1(satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Biatan.

#### o Program dan Kegiatan

##### Program

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, yaitu:

- o Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- o Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

##### Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- o Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- o Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

##### Kegiatan

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. kegiatan-kegiatan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau meliputi :

- o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- o Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- o Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- o Administrasi Umum Perangkat Daerah
- o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- o Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- o Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Biatan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Biatan Tahun 2023 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Biatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan  
Prakiraan Maju (Bertambah/Berkurang) Tahun 2024

KODE	URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA		RENCANA KERJA TA. 2024		PERKIRAAN MAJU TA. 2025	
			KEGIATAN	KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01	KECAMATAN BIATAN		100 Persen	90,70 Persen	100 Persen	4.314.634.508,00	100 Persen	4.346.552.000,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	90,25 Persen	100 Persen	3.433.302.508,00	100 Persen	3.456.273.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	24.570.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	21.836.000,00	2 Laporan	25.000.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pameran Berau Expo yang diikuti	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	120.533.000,00	1 Laporan	130.600.000,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.104.468.352,00	12 Bulan	2.200.000.000,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Person	100 Person	90.386.656,00	100 Person	116.480.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	100 Person	18.000.000,00	100 Person	18.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	5.000.000,00	7 Jenis	5.000.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	35.000.000,00	7 Jenis	79.667.000,00

Bersambung ...

KODE	URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA		RENCANA KERJA TA. 2024		PERKIRAAN MAJU TA. 2025	
			KEGIATAN	KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	7.999.000,00	7 Jenis	21.726.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Acara Bakar Ikan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18 Kali	18 Kali	96.878.000,00	18 Kali	96.900.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000 Lembar	8.000 Lembar	3.000.000,00	8.000 Lembar	3.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00	50 Laporan	80.000.000,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	2 Unit	52.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	994.000,00	4 Laporan	1.500.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	55.788.200,00	12 Bulan	60.800.000,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	20 Unit	9.977.700,00	20 Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	357.600.000,00	12 Bulan	357.600.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Unit	13 Unit	160.000.000,00	13 Unit	125.000.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	194.271.600,00	1 Dokumen	50.000.000,00

Bersambung ...

KODE	URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA		RENCANA KERJA TA. 2024		PERKIRAAN MAJU TA. 2025	
			KEGIATAN	KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	100 Persen	95,68 Persen	100 Persen	587.620.000,00	100 Persen	643.551.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kampung yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kampung	8 Kampung	15.000.000,00	8 Kampung	15.000.000,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah bulan jasa Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang dibayar	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	12 Bulan	383.000.000,00	12 Bulan	418.000.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota PKK, FKKS dan Peserta MTQ tingkat kecamatan yang dibina	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kampung	8 Kampung	189.620.000,00	8 Kampung	210.551.000,00
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	100 Persen	99,87 Persen	100 Persen	49.700.000,00	100 Persen	50.000.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	12 Kali	49.700.000,00	12 Kali	50.000.000,00

Bersambung ...

KODE	URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA		RENCANA KERJA TA. 2024		PERKIRAAN MAJU TA. 2025	
			KEGIATAN	KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	101.350.000,00	100 Persen	76.500.000,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Kali	12 Kali	101.350.000,00	12 Kali	76.500.000,00
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	71,43 Persen	100 Persen	142.662.000,00	100 Persen	120.228.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang dibina terkait Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Kampung	8 Kampung	102.684.000,00	8 Kampung	80.250.000,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kali	3 Kali	24.978.000,00	3 Kali	24.978.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Kampung	8 Kampung	15.000.000,00	8 Kampung	15.000.000,00

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

## 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja (PK) adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Biatan Tahun 2023 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPAP) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 5(lima) Program Sasaran Strategis sebagai berikut :

Table 2.4.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Kecamatan Biatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kampung se-Kecamatan Biatan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Persen	94,52
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	94,52

No.	Program	Total Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.628.073.900,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.603.932.568,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.49.748.500,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.39.100.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.114.228.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.4.435.082.968,00</b>

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Secara umum Rencana Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Biatan Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Kecamatan Biatan telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dalam meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kampung se Kecamatan Biatan.

Pengelolaan keuangan kecamatan biatan dalam 3(tiga) tahun terakhir yang dijelaskan dalam bentuk realisasi fisik dan keuangan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dan prediksinya sampai dengan tahun 2024, alokasi dan realisasi dana pada 4(empat) tahun terakhir, yang menjadi sandaran penting untuk menentukan focus/prioritas program dan kegiatan tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau ditunjang dengan Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Biatan  
Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

No	Uraian Anggaran	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2020	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2021	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2022	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2023
<b>A</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.202.311.145</b>	<b>3.471.026.579</b>	<b>4.535.126.945</b>	<b>4.435.082.968</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.140.411.145</b>	<b>3.333.230.779</b>	<b>4.033.455.145</b>	<b>4.357.444.968</b>
1	Belanja Pegawai	2.111.158.000	1.902.215.295	2.277.922.329	2.281.553.152
2	Belanja Barang dan Jasa	1.029.253.145	1.431.015.484	1.755.532.816	2.075.891.816
<b>C</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>61.900.000</b>	<b>137.795.800</b>	<b>501.671.800</b>	<b>77.638.000</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.900.000	137.795.800	501.671.800	77.638.000

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

### 3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*). sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Biatan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*) Kecamatan Biatan Tahun 2023.

a) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

b) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran(*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*) pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Biatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5(lima) program sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4(empat) skala nilai peringkat kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a) 91 % ≤ 100 % = Sangat Tinggi (ST)
- b) 76 % ≤ 90% = Tinggi (T)
- c) 66 % ≤ 75 % = Sedang (S)
- d) 51% ≤ 65 % = Rendah (R)
- e) ≤ 50 % = Sangat Rendah (SR)

Capaian kinerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau sesuai dengan Perjanjian Kinerja (*PK*) Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dana kuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Biatan tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Biatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 5(lima) program dan 11(sebelas) kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

3.3.1. Membandingkan antara target realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Membandingkan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2023  
Kecamatan Biatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (Rp.)	
		CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RP.	%
1	2	3	4	5	6
07.01	KECAMATAN BIATAN	100 Person	4.435.082.968	4.022.603.247	90,70
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Person	3.628.073.900	3.274.389.681	90,25
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Person	193.700.000	111.145.364	57,38
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	43.000.000	34.239.366	79,63
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.000.000	24.516.180	98,06
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	125.700.000	52.389.818	41,68

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (Rp.)	
		CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RP.	%
1	2	3	4	5	6
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.296.853.152</b>	<b>2.139.900.010</b>	<b>93,17</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.197.073.152	2.049.660.010	93,29
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen	99.780.000	90.240.000	90,44
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>29.872.000</b>	<b>29.872.000</b>	<b>100,00</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Persen	29.872.000	29.872.000	100,00
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>387.974.020</b>	<b>321.189.633</b>	<b>82,79</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7.500.000	7.480.000	99,73
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	79.987.000	76.853.100	96,06
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	35.723.020	32.648.000	91,39
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Kali	96.970.000	54.628.000	56,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000 Lembar	3.994.000	3.570.000	89,38
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	163.800.000	146.010.533	89,14
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>419.823.728</b>	<b>381.793.574</b>	<b>90,94</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.498.000	1.498.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber-Data Air dan Listrik	12 Bulan	62.200.000	41.930.128	67,41
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	24.000.000	7.760.000	32,33
7.01.01.2.08.04	Peningkatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	332.125.728	330.605.446	99,54
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>299.851.000</b>	<b>290.489.100</b>	<b>96,88</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	154.851.000	145.489.100	93,95
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen	145.000.000	145.000.000	100,00
<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>603.932.568</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>603.932.568</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Kampung	19.997.000	19.425.000	97,14
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Bulan	383.009.568	370.116.566	96,63
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kampung	200.926.000	188.289.000	93,71
<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.748.500</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.748.500</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	49.748.500	49.685.000	99,87
<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>39.100.000</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>39.100.000</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Kali	39.100.000	39.100.000	100,00
<b>07.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.228.000</b>	<b>81.598.000</b>	<b>71,43</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.228.000</b>	<b>81.598.000</b>	<b>71,43</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Kampung	74.250.000	43.550.000	58,65
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Kali	24.978.000	24.978.000	100,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Kampung	15.000.000	13.070.000	87,13

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

3.3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1  
Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja  
Tahun 2021 s/d. 2023 Kecamatan Biatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	TAHUN ANGGARAN 2021		TAHUN ANGGARAN 2022		TAHUN ANGGARAN 2023	
				CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				RP.	%	RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07.01</b>	<b>KECAMATAN BIATAN</b>		<b>100 Persen</b>	<b>3.241.512.918,00</b>	<b>93,39</b>	<b>4.153.957.694,00</b>	<b>91,59</b>	<b>4.022.603.247</b>	<b>90,70</b>
<b>07.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.670.676.864,00</b>	<b>94,28</b>	<b>3.462.788.422,00</b>	<b>91,59</b>	<b>3.274.389.681</b>	<b>90,25</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>35.196.700,00</b>	<b>58,93</b>	<b>31.873.000,00</b>	<b>85,80</b>	<b>111.145.364</b>	<b>57,38</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	35.196.700,00	58,93	22.700.000,00	90,61	34.239.366	79,63
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	9.173.000,00	75,50	24.516.180	98,06
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pameran Berau Expo yang diikuti	1 Laporan	0,00	0,00			52.389.818	41,68
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.905.916.570,00</b>	<b>98,45</b>	<b>2.076.577.195,00</b>	<b>90,55</b>	<b>2.139.900.010</b>	<b>93,17</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.836.555.570,00	98,39	1.990.397.195,00	90,18	2.049.660.010	93,29
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayar	100 Persen	69.361.000,00	100,00	86.180.000,00	100,00	90.240.000	90,44
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.872.000</b>	<b>100,00</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakalan dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	100 Persen	0,00	0,00	9.000.000,00	100,00	29.872.000	100,00
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>232.901.505,00</b>	<b>85,50</b>	<b>224.113.887,00</b>	<b>82,95</b>	<b>321.189.633</b>	<b>82,79</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	4.990.000,00	100,00	4.952.500,00	99,54	7.480.000	99,73

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	TAHUN ANGGARAN 2021		TAHUN ANGGARAN 2022		TAHUN ANGGARAN 2023	
				CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	RP.	%	RP.	%	RP.	%
				5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	7 Jenis	117.504.500,00	91,72	84.717.300,00	93,03	76.853.100	96,08
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Jenis	16.766.000,00	94,00	1.982.000,00	66,43	32.648.000	91,39
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Acara Bakar Ixah)	18 Kali	54.926.000,00	69,56	67.166.000,00	74,81	54.628.000	56,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8.000 Lembar	565.000,00	19,08	120.000,00	4,06	3.570.000	89,38
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	50 Laporan	38.150.000,00	96,44	65.176.080,00	83,13	146.010.533	89,14
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.059.000,00</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 Unit	0,00	0,00	449.059.000,00	97,24	0,00	0,00
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>362.295.994,00</b>	<b>87,29</b>	<b>370.423.847,00</b>	<b>94,67</b>	<b>381.793.574</b>	<b>90,94</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	4 Laporan	1.600.000,00	80,13	1.530.000,00	76,67	1.498.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Bulan	55.753.878,00	85,78	35.980.579,00	73,10	41.930.128	67,41
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	20 Unit	1.000.000,00	20,20	1.000.000,00	20,41	7.760.000	32,33
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	12 Bulan	303.942.115,00	88,59	331.913.268,00	99,03	330.605.446	99,54
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>134.366.105,00</b>	<b>89,76</b>	<b>301.741.507,00</b>	<b>94,88</b>	<b>290.489.100</b>	<b>96,88</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	0,00	0,00	204.741.500,00	92,64	145.489.100	93,95

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	TAHUN ANGGARAN 2021		TAHUN ANGGARAN 2022		TAHUN ANGGARAN 2023	
				CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				RP.	%	RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	134.366.100,00	96,01	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dokumen	0,00	0,00	97.000.000,00	100,00	145.000.000	100,00
<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>384.697.254,00</b>	<b>94,35</b>	<b>550.455.772,00</b>	<b>91,07</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>384.697.254,00</b>	<b>94,35</b>	<b>550.455.772,00</b>	<b>91,07</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kampung yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	8 Kampung	0,00	0,00	13.260.000,00	75,80	19.425.000	97,14
7.01.03.2.01.02	Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah bulan jasa Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang dibayar	12 Bulan	333.444.254,00	94,35	373.426.772,00	97,12	370.116.566	96,63
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota PKK, FKKS dan Peserta NTQ tingkat kecamatan yang dibina	8 Kampung	51.253.000,00	93,22	163.769.000,00	80,89	188.269.000	93,71
<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>129.492.400,00</b>	<b>86,33</b>	<b>67.545.500,00</b>	<b>96,52</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>129.492.400,00</b>	<b>86,33</b>	<b>67.545.500,00</b>	<b>96,52</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	12 Kali	129.492.400,00	86,33	67.545.500,00	96,52	49.685.000	99,87
<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan	12 Kali	0,00	0,00	24.834.000,00	100,00	39.100.000	100,00

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	TAHUN ANGGARAN 2021		TAHUN ANGGARAN 2022		TAHUN ANGGARAN 2023	
				CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				RP.	%	RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	56.646.400,00	70,94	48.334.000,00	87,57	81.598.000	71,43
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	56.646.400,00	70,94	48.334.000,00	87,57	81.598.000	71,43
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang dibina terkait Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)	8 Kampung	37.220.400,00	82,87	40.200.000,00	100,00	43.550.000	58,65
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung	3 Kali	9.976.000,00	100,00	0,00	0,00	24.978.000	100,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 Kampung	0,00	0,00	8.134.000,00	54,24	13.070.000	87,13
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Kampung	9.450.000,00	37,85	0,00	0,00		

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan dan fisik tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami penurunan dengan nilai dari tahun 2021 sebesar Rp.3.241.512.918,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau (93,39%), tahun 2022 sebesar Rp.4.153.957.694,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau (91,60%) dan tahun 2023 sebesar Rp.4.022.603.247,00 (empat milyar dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau (90,70%) keadaan ini disebabkan karena Peringatan HUT-RI Tingkat Kabupaten yaitu kegiatan Pawai Pembangunan di Tanjung Redeb serta perjalanan Dinas terkait Bimtek perencanaan dan keuangan daerah kerjasama Pemkab Berau dengan UGM Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan dan dikuti dikarenakan keterbatasan waktu perencanaan dan adanya kesalahan perhitungan DPA-ABT Tahun Anggaran 2023 tentang honorarium Tim evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kampung (APBK) yang seharusnya 1 triwulan menjadi 4 triwulan.

3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.3  
Pembandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah  
2021, 2022 dan 2023 Kecamatan Biatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2021				TAHUN ANGGARAN 2022				TAHUN ANGGARAN 2023			
			TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
			%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>07.01</b>	<b>KECAMATAN BIATAN</b>		<b>100,00</b>	<b>3.471.026.582,00</b>	<b>93,39</b>	<b>3.241.512.918,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.535.126.945,00</b>	<b>91,59</b>	<b>4.153.957.694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.435.082.968,00</b>	<b>80,70</b>	<b>4.022.601.247,00</b>
<b>07.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>2.832.768.770,00</b>	<b>94,28</b>	<b>2.670.676.864,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.780.655.313,00</b>	<b>91,59</b>	<b>3.462.788.422,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.628.073.900,00</b>	<b>90,25</b>	<b>3.274.389.681,00</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Pengangarah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>59.724.700,00</b>	<b>58,93</b>	<b>35.196.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.147.600,00</b>	<b>85,80</b>	<b>31.873.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>193.700.000,00</b>	<b>57,38</b>	<b>111.145.364,00</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah yang disusun	100,00	59.724.700,00	58,93	35.196.700,00	100,00	24.997.600,00	90,81	22.700.000,00	100,00	43.000.000,00	79,63	34.239.366,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.150.000,00	75,50	9.173.000,00	100,00	25.000.000,00	98,06	24.516.190,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pameran Berau Expo yang diikuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700.000,00	41,68	52.389.818,00
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>1.935.905.298,00</b>	<b>98,45</b>	<b>1.905.916.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.293.222.329,00</b>	<b>90,55</b>	<b>2.076.577.195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.296.853.152,00</b>	<b>93,17</b>	<b>2.139.900.010,00</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	1.886.544.298,00	98,39	1.836.555.570,00	100,00	2.207.042.329,00	90,18	1.990.397.195,00	100,00	2.192.073.152,00	93,29	2.049.660.010,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayar	100,00	89.361.000,00	100,00	89.361.000,00	100,00	86.180.000,00	100,00	86.180.000,00	100,00	99.780.000,00	90,44	90.240.000,00
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>####</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.872.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.872.000,00</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	29.872.000,00	100,00	29.872.000,00
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>272.412.500,00</b>	<b>85,56</b>	<b>232.901.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270.167.600,00</b>	<b>82,95</b>	<b>224.113.880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>387.974.020,00</b>	<b>82,79</b>	<b>321.189.633,00</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00	4.990.100,00	100,00	4.990.000,00	100,00	4.975.600,00	99,54	4.952.500,00	100,00	7.500.000,00	99,73	7.480.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100,00	128.105.700,00	91,72	117.504.500,00	100,00	91.067.800,00	93,03	84.717.300,00	100,00	79.987.000,00	96,08	76.853.100,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100,00	17.836.000,00	94,00	16.766.000,00	100,00	2.983.400,00	66,43	1.982.000,00	100,00	35.723.020,00	91,39	32.648.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Acara Bakar Ikan)	100,00	78.960.000,00	69,56	54.926.000,00	100,00	89.784.000,00	74,81	67.166.000,00	100,00	96.970.000,00	56,33	54.628.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00	2.960.700,00	19,08	565.000,00	100,00	2.959.000,00	4,06	120.000,00	100,00	3.994.000,00	89,38	3.570.000,00

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2021				TAHUN ANGGARAN 2022				TAHUN ANGGARAN 2023			
			TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
			%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100,00	39.560.000,00	96,44	38.150.000,00	100,00	78.398.000,00	83,13	65.176.080,00	100,00	163.800.000,00	89,14	146.010.533,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	461.810.000,00	97,24	449.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	461.810.000,00	97,24	449.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	100,00	415.025.772,00	87,29	362.295.994,00	100,00	391.292.384,00	94,67	370.423.847,00	100,00	419.823.728,00	90,94	381.793.574,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	100,00	1.896.700,00	80,13	1.600.000,00	100,00	1.995.600,00	76,67	1.530.000,00	100,00	1.498.000,00	100,00	1.498.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	100,00	65.000.000,00	85,78	55.753.878,00	100,00	49.220.000,00	73,10	35.980.579,00	100,00	62.200.000,00	67,41	41.030.128,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100,00	4.950.000,00	20,20	1.000.000,00	100,00	4.900.000,00	20,41	1.000.000,00	100,00	24.000.000,00	32,33	7.760.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	100,00	343.079.072,00	88,59	303.942.116,00	100,00	335.176.784,00	99,03	331.913.268,00	100,00	332.125.728,00	96,54	330.605.446,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	100,00	149.700.500,00	89,76	134.366.100,00	100,00	318.015.400,00	94,88	301.741.500,00	100,00	299.851.000,00	96,88	290.489.100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00	9.750.000,00	0,00	0,00	100,00	221.015.400,00	92,64	204.741.500,00	100,00	154.851.000,00	93,95	145.489.100,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00	139.950.500,00	96,01	134.366.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97.000.000,00	100,00	97.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00
07.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	100,00	408.408.512,00	94,35	384.697.254,00	100,00	604.459.132,00	91,07	550.455.772,00	100,00	603.932.568,00	95,68	577.830.566,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	100,00	408.408.512,00	94,35	384.697.254,00	100,00	604.459.132,00	91,07	550.455.772,00	100,00	603.932.568,00	95,68	577.830.566,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kampung yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.494.500,00	75,80	13.260.000,00	100,00	19.997.000,00	97,14	19.425.000,00

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2021				TAHUN ANGGARAN 2022				TAHUN ANGGARAN 2023			
			TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN		TARGET KINERJA		REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah bulan Jasa Tenaga Pendamping Pajuang SIGAP Sejahtera yang dibayar	100,00	353.428.112,00	94,35	333.444.254,00	100,00	394.502.032,00	97,12	373.426.772,00	100,00	383.009.568,00	96,63	370.116.666,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota PKK, RKKS dan Peserta MTQ tingkat kecamatan yang dibina	100,00	54.880.400,00	93,22	51.253.000,00	100,00	202.462.600,00	80,89	163.769.000,00	100,00	200.926.000,00	93,71	188.289.000,00
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>149.996.400,00</b>	<b>86,33</b>	<b>129.492.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.981.800,00</b>	<b>96,52</b>	<b>67.545.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.748.500,00</b>	<b>99,87</b>	<b>49.685.000,00</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>149.996.400,00</b>	<b>86,33</b>	<b>129.492.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.981.800,00</b>	<b>96,52</b>	<b>67.545.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.748.500,00</b>	<b>99,87</b>	<b>49.685.000,00</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Proses yang dilakukan	100,00	149.996.400,00	86,33	129.492.400,00	100,00	69.981.800,00	96,52	67.545.500,00	100,00	49.748.500,00	99,87	49.685.000,00
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>####</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000,00</b>
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>####</b>	<b>24.834.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.100.000,00</b>
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24.834.000,00	100,00	24.834.000,00	100,00	39.100.000,00	100,00	39.100.000,00
07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100,00</b>	<b>79.852.900,00</b>	<b>70,94</b>	<b>56.646.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.196.700,00</b>	<b>87,57</b>	<b>48.334.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.228.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>81.598.000,00</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100,00</b>	<b>79.852.900,00</b>	<b>70,94</b>	<b>56.646.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.196.700,00</b>	<b>87,57</b>	<b>48.334.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.228.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>81.598.000,00</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang dibina terkait Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)	100,00	44.911.900,00	82,87	37.220.400,00	100,00	40.200.000,00	100,00	40.200.000,00	100,00	74.250.000,00	58,65	43.550.000,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung	100,00	9.976.000,00	100,00	9.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978.000,00	100,00	24.978.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.996.700,00	54,24	8.134.000,00	100,00	15.000.000,00	87,13	13.070.000,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	24.965.000,00	37,85	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Biatan untuk tahun anggaran tersebut selesai lebih awal.
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan dengan aparatur kampung se Kecamatan Biatan
- Terselenggaranya pelayanan admisnistrasi masyarakat
- Adanya kerjasama dan kemauan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan

Dalam menghadapi krisis keuangan yang semakin memburuk dampak perang dagang antara amerika serikat dan china menyebabkan inflasi, hilangnya tabungan masyarakat, meningkatnya ketikpastian dan hilangnya kepercayaan terhadap system keuangan, serta menurunnya ekspor bahan baku atau bahan penolong Indonesia ke Amerika Serikat dan China yang mempengaruhi pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2023 namun hal tersebut juga berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga mengalami pengurangan diantaranya pendapatan pajak dan dana transfer dari pusat.

Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 90,70% atau Rp. 4.022.603.247,00 (empat milyar dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. adapun peningkatan/penurunan kinerja yang dihadapi Kecamatan Biatan Tahun Anggaran 2023 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Kondisi geografis Kecamatan Biatan yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten (130 km) menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus surat-surat penting ke Kabupaten.
- Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
- Sumber daya manusia (SDM) PTT/Tenaga Kontrak memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan keahliannya;
- Jumlah anggaran belanja modal yang terbatas atau sangat rendah tiap tahunnya khususnya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Standar pelayanan kepada masyarakat belum dapat terpenuhi secara maksimal disebabkan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- Peringatan HUT-RI Tingkat Kabupaten yaitu kegiatan Pawai Pembangunan di Tanjung Redeb serta perjalanan Dinas terkait Bimtek perencanaan dan keuangan daerah kerjasama Pemkab Berau dengan UGM Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan dan dikuti dikarenakan keterbatasan waktu perencanaan
- Kesalahan perhitungan DPA-ABT Tahun Anggaran 2023 tentang honorarium Tim evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kampung (APBK) yang seharusnya 1 triwulan menjadi 4 triwulan.

Alternative solusi yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Biatan untuk mengatasi kegagalan dan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- Surat atau Undangan yang sifatnya mendesak mengharuskan kehadiran kami ke Kabupaten seharusnya dikirim jauh hari sebelum mendekati waktu pelaksanaan mengingat jarak tempuh Kecamatan Biatan Ke Ibu Kota Kabupaten  $\pm$  3 jam.
- Mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
- Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
- Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
- Mengoptimalkan penggunaan perlengkapan meubeleu yang ada dalam menunjang kegiatan/operasional perkantoran atau menambah pagu anggaran belanja khususnya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Sebaiknya penetapan/pembentukan panitia pelaksana kegiatan dilakukan lebih cepat dan tepat waktu

### 3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta sumber daya manusia (SDM) PTT/Tenaga Kontrak memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga terjadi penumpukan pekerjaan di beberapa ASN tertentu, selain itu di setiap seksi-seksi kurang tenaga terampil yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat membantu kepala seksi dalam menjalankan tupoksinya.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Biatan Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana gedung pada Kantor Camat Biatan Kabupaten Berau terdiri dari ruangan Camat, ruangan Sekretaris, ruangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, ruangan Sub Bagian penyusunan Program, Keuangan dan Aset, ruangan Seksi

Pelayanan Umum, ruangan Seksi Kesejahteraan Sosial, ruangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban,

3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan khususnya di Kecamatan Biatan sifatnya adalah rutin sehingga ini yang menjadi penghambat untuk dapat mewujudkan penetapan kinerja. Sebagus apapun penetapan kinerja jika tidak ditunjang dengan program/kegiatan yang ditunjang dengan terpenuhinya anggaran maka penetapan kinerja tidak akan bisa berjalan, hal ini dikarenakan disetiap seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Biatan tidak memiliki Program/kegiatan yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Kantor Kecamatan Biatan).

3.3.7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Biatan tahun 2023 yang digunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4.1  
Realisasi Anggaran Tahun 2023  
Kecamatan Biatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 2023		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				RP.	RP.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	3.628.073.900,00	3.274.389.681	90,25		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	193.700.000,00	111.145.364	57,38		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	43.000.000,00	34.239.366	79,63		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	24.516.180	98,06		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pameran Berau Expo yang diikuti	1 Laporan	125.700.000,00	52.389.818	41,68	Peringatan HUT-RI Tingkat Kabupaten yaitu kegiatan Pawai Pembangunan di Tanjung Redeb serta perjalanan Dinas terkait Bimtek perencanaan dan keuangan daerah kerjasama Pemkab Berau dengan UGM Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan dan dikuti dikarenakan keterbatasan waktu perencanaan	Perlu adanya perencanaan, evaluasi dan pengawasan pada saat penyusunan anggaran dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	2.296.853.152,00	2.139.900.010	93,17		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.197.073.152	2.049.660.010	93,29		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayar	100 Persen	99.780.000	90.240.000	90,44		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	29.872.000,00	29.872.000	100,00		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	100 Persen	29.872.000,00	29.872.000	100,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100 Persen	387.974.020,00	321.189.633	82,79		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	7.500.000,00	7.480.000	99,73		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	7 Jenis	79.987.000,00	76.853.100	96,08		

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 2023		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				RP.	RP.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Jenis	35.723.020,00	32.648.000	91,39		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Acara Bakar Ikan)	18 Kall	96.970.000,00	54.628.000	56,33		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8.000 Lembar	3.994.000,00	3.570.000	89,38		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	50 Laporan	163.800.000,00	146.010.533	89,14		
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>419.823.728,00</b>	<b>381.793.574</b>	<b>90,94</b>		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	4 Laporan	1.498.000,00	1.498.000	100,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Bulan	62.200.000,00	41.930.128	67,41		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	20 Unit	24.000.000,00	7.760.000	32,33		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	12 Bulan	332.125.728,00	330.605.446	99,54		
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 Persen</b>	<b>299.851.000,00</b>	<b>290.489.100</b>	<b>96,88</b>		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	154.851.000,00	145.489.100	93,95		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dokumen	145.000.000,00	145.000.000	100,00		
<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>603.932.568,00</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>		
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>603.932.568,00</b>	<b>577.830.566</b>	<b>95,68</b>		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kampung yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	8 Kampung	19.997.000,00	19.425.000	97,14		

Bersambung ...

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 2023		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				RP.	RP.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah bulan jasa Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang dibayar	12 Bulan	383.009.568,00	370.116.566	96,63		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota PKK, FKKS dan Peserta MTQ tingkat kecamatan yang dibina	8 Kampung	200.926.000,00	188.289.000	93,71		
07.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.748.500,00</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>		
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.748.500,00</b>	<b>49.685.000</b>	<b>99,87</b>		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	12 Kali	49.748.500,00	49.685.000	99,87		
07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>39.100.000,00</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>		
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KECAMATAN</b>	<b>100 Persen</b>	<b>39.100.000,00</b>	<b>39.100.000</b>	<b>100,00</b>		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan	12 Kali	39.100.000,00	39.100.000	100,00		
07.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.228.000,00</b>	<b>81.598.000</b>	<b>71,43</b>		
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.228.000,00</b>	<b>81.598.000</b>	<b>71,43</b>		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kampung yang dibina terkait Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)	8 Kampung	74.250.000,00	43.550.000	58,65	Adanya kesalahan perhitungan DPA-ABT TA. 2023 tentang honorarium Tim evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kampung (APBK) yang seharusnya 1 triwulan menjadi 4 triwulan	Lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan pada saat pengimputan di SIPD
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung	3 Kali	24.978.000,00	24.978.000	100,00		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kampung yang difasilitasi terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 Kampung	15.000.000,00	13.070.000	87,13		
<b>JUMLAH</b>			<b>100 Persen</b>	<b>4.435.082.968,00</b>	<b>4.022.603.247</b>	<b>90,70</b>		

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Biatan pada tahun Anggaran 2023 sebagai berikut Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar (90,25%) atau Rp.3.274.389.681,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar (95,68%) atau Rp.577.830.566,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar (99,87%) atau Rp.49.685.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar (100,00%) atau Rp.39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar (71,43%) atau Rp.81.598.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara Keseluruhan realisasi program dan kegiatan fisik dan keuangan Kecamatan Biatan adalah (90,70%) atau Rp.4.022.603.247,00 (empat milyar dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada Kecamatan Biatan dapat berjalan dengan baik pada skala kategori penilaian *Sangat Baik*. walaupun realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00%, dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal antara lain Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kelancaran operasional Kecamatan Biatan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Biatan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKj-IP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### B. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Biatan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Biatan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kampung, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Perangkat kampung belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Kampung belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah - langkah untuk meminimalkan hambatan - hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat maupun pembinaan - pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi Kampung secara bertahap di 8(delapan) Kampung se Kecamatan Biatan.

### C. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Biatan selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun dalam menghadapi krisis keuangan yang semakin

memburuk dampak perang dagang antara amerika serikat dan china menyebabkan inflasi, hilangnya tabungan masyarakat, meningkatnya ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan terhadap system keuangan, serta menurunnya ekspor bahan baku atau bahan penolong Indonesia ke Amerika Serikat dan China kondisi tersebut dilakukan lantaran diperlukan realokasi sejumlah kegiatan anggaran untuk penanganan tersebut. demikian juga hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Biatan tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.